

Yth.

1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /SEOJK.05/2020
TENTANG
RENCANA BISNIS PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.
2. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
8. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
9. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan

Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

11. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
12. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pendanaan;
 - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Bagi PMV yang memiliki UUS, cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.

3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
4. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode tahun sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
6. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan

dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:

- 1) analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri termasuk dengan lembaga jasa keuangan lainnya, beserta informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan;
 - 2) arah kebijakan Perusahaan, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
8. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c angka 1), Perusahaan dapat menggunakan metode analisis perencanaan strategis yang relevan.
9. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah yang paling sedikit meliputi:
- a. rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan jenis kegiatan usaha;
 - b. rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan sektor ekonomi; dan
 - c. rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan lokasi.

11. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. rencana pengelolaan dana ventura yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. rencana pelaksanaan kegiatan jasa berbasis *fee* yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 12 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
 - a. proyeksi permodalan; dan
 - b. rencana perubahan modal.
15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 14 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
16. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi rencana perolehan pendanaan dari:
 - a. rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - b. rencana pendanaan berdasarkan mata uang.

17. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 16 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
18. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor cabang, kantor cabang unit syariah, dan/atau kantor selain kantor cabang unit syariah;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang unit syariah, dan/atau kantor selain kantor cabang unit syariah; dan
 - c. rencana penutupan kantor cabang, kantor cabang unit syariah, dan/atau kantor selain kantor cabang unit syariah.
19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 18 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
20. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia:
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;

- a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
 - c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Perusahaan;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan.
21. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
22. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.
23. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, nilai tukar, dan tingkat inflasi, tingkat suku bunga acuan, dan asumsi makro lain yang terkait dengan pertumbuhan dan/atau perkembangan industri modal ventura; dan
 - 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan penyertaan, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan pendanaan, tingkat bunga/imbal hasil pendanaan, tingkat bunga/imbal hasil penyertaan/pembiayaan, dan rasio aset penyertaan/pembiayaan bermasalah; dan
 - b. informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif;
 - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
 - 4) proyeksi rekening administratif.
24. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10;
 - c. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 16;
 - d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23; dan
 - e. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 25,

disajikan:

- 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - 4) dalam mata uang rupiah penuh.
27. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
- a. rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 - b. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
 - c. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan;
 - d. rencana konversi PMV menjadi PMVS; dan
 - e. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS.
28. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik
29. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
30. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf c disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
31. Rencana konversi PMV menjadi PMVS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf d disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

32. Rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf e disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
33. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
 - g. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b;
 - h. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf c;
 - i. rencana konversi PMV menjadi PMVS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf d; dan
 - j. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf e,
memuat juga uraian mengenai:
 - 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - 2) strategi Perusahaan untuk merealisasikan rencana dimaksud.
34. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur

formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis, termasuk mengenai fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi PMV yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun

- kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan.
6. Bagi PMV yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
 7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
 8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Perusahaan harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau

- b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
 - a. untuk PMV:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710; atau
 - b. untuk PMVS dan PMV yang memiliki UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Format 1	: Ringkasan Eksekutif	2
Format 2	: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya	9
Format 3	: Visi, Misi, dan Strategi Bisnis	10
Format 4	: Rencana Kegiatan Usaha	11
Format 5	: Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha	26
Format 6	: Rencana Permodalan	31
Format 7	: Rencana Pendanaan	33
Format 8	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi	42
Format 9	: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi	43
Format 10	: Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan	51
Format 11	: Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu	80
Format 12	: Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan	81
Format 13	: Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan	84
Format 14	: Rencana Konversi PMV Menjadi PMVS	85
Format 15	: Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS	86
Format 16	: Laporan Realisasi Rencana Bisnis	88
Format 17	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	90

Format 1 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.

2. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.

3. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.

4. Indikator Keuangan Utama

a. Format Indikator Keuangan Utama bagi PMV

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Total Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura				
	a. Penyertaan Saham				
	b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi				
	c. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
	d. Pembiayaan Usaha Produktif				
	e. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
	f. Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah				
3.	Penyertaan pada Dana Ventura				
4.	Pinjaman Dalam Negeri				
5.	Pinjaman Luar Negeri				
6.	Penerbitan Surat Berharga				
7.	Ekuitas				

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
8.	Laba (Rugi)				
9.	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
	a. Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
	b. Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
10.	Rasio <i>Non Performing Investment and Financing</i> /NPIF Bruto				
11.	Rasio <i>Non Performing Investment and Financing</i> /NPIF Neto				
12.	Rentabilitas				
	a. <i>Return on Asset</i>				
	b. <i>Return on Equity</i>				
	c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
13.	Likuiditas				
	a. <i>Current Ratio</i>				
	b. <i>Cash Ratio</i>				
14.	Nilai Dana Ventura yang dikelola				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan indikator keuangan mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

b. Format Indikator Keuangan Utama bagi PMVS dan UUS dari PMV

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
1.	Total Aset				
2.	Total Investasi Modal Ventura				
	a. Penyertaan Saham				
	b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
	c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
	d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
	e. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
3.	Penyertaan pada Dana Ventura				

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
4.	Pendanaan Dalam Negeri				
5.	Pendanaan Luar Negeri				
6.	Penerbitan Surat Berharga				
7.	Ekuitas				
8.	Laba (Rugi)				
9.	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
	a. Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
	b. Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				
10.	Rasio <i>Non Performing Investment and Financing</i> /NPIF Bruto				
11.	Rasio <i>Non Performing Investment and Financing</i> /NPIF Neto				
12.	Rentabilitas				
	a. <i>Return on Asset</i>				
	b. <i>Return on Equity</i>				
	c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional				
13.	Likuiditas				

No.	Indikator Keuangan ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
			Des X-1	Juni X	Des X
	a. <i>Current Ratio</i>				
	b. <i>Cash Ratio</i>				
14.	Nilai Dana Ventura yang dikelola				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan indikator keuangan mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

c. Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan

<p>(uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama)</p>
--

5. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun¹⁾

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Keterangan:

¹⁾ antara lain meliputi penurunan aset produktif dalam bentuk penyertaan/pembiayaan bermasalah (*non performing investment and financing/NPIF*), peningkatan penyaluran penyertaan/pembiayaan, peningkatan efisiensi Perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.

Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

(Diisi dengan penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi rencana bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.)

Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Perusahaan

.....
.....

2. Misi Perusahaan

.....
.....

3. Strategi Bisnis Perusahaan

a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha

.....
.....

b. arah kebijakan Perusahaan

.....
.....

c. strategi pengembangan bisnis

.....
.....

Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha

1. Rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha
 - a. Tabel Rencana Usaha Modal Ventura Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha bagi PMV

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Pembiayaan/Penyertaan Baru:				
1. Penyertaan Saham (<i>Equity Participation</i>)				
2. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi (<i>Quasi Equity Participation</i>)				
3. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
4. Pembiayaan Usaha Produktif				
5. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
Total Rencana Pembiayaan/Penyertaan Baru				
B. Saldo Posisi (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Penyertaan Saham (<i>Equity Participation</i>)				
2. penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi (<i>Quasi Equity Participation</i>)				

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-Up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
4. Pembiayaan Usaha Produktif				
5. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
Total Saldo Posisi (<i>Outstanding Principa</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Tabel Rencana Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha bagi PMVS dan UUS dari PMV

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah Baru:				
1. Penyertaan Saham (<i>Equity Participation</i>)				
2. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
3. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
5. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
Total Rencana Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah Baru				
B. Saldo Posisi (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Penyertaan Saham (<i>Equity Participation</i>)				
2. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
3. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
5. Kegiatan Usaha Lain Berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa				

Jenis Penggunaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Keuangan				
Total Saldo Posisi (<i>Outstanding Principal</i>)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

c. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan jenis kegiatan usaha.)

d. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan jenis kegiatan usaha.)

2. Rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi

a. Tabel Rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Rencana Pembiayaan/Penyertaan Baru:				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Pergudangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman				
10. Informasi dan Komunikasi				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
B. Saldo posisi (<i>Outstanding Principal</i>):				
Sektor Ekonomi Lapangan Usaha				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2. Pertambangan dan Penggalian				
3. Industri Pengolahan				
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin				
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
6. Konstruksi				
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
8. Pengangkutan dan Pergudangan				
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
10. Informasi dan Komunikasi				
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
12. Real Estat				
13. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis				
14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya				
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
16. Pendidikan				
17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				
18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi				
19. Aktivitas Jasa Lainnya				
20. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				

Sektor Ekonomi	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha				
22. Rumah Tangga				
23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pembiayaan/penyertaan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pembiayaan/penyertaan.)

3. Rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Lokasi

a. Tabel Rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah Berdasarkan Lokasi

Lokasi Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Pembiayaan/Penyertaan Baru:				
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				
15. Kepulauan Riau				
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				

Lokasi Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				
B. Saldo Posisi (<i>Outstanding Principal</i>):				
1. Jawa Barat				
2. Banten				
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta				
4. Daerah Istimewa Yogyakarta				
5. Jawa Tengah				
6. Jawa Timur				
7. Bengkulu				
8. Jambi				
9. Nanggroe Aceh Darussalam				
10. Sumatera Utara				
11. Sumatera Barat				
12. Riau				
13. Sumatera Selatan				
14. Kepulauan Bangka Belitung				

Lokasi Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
15. Kepulauan Riau				
16. Lampung				
17. Kalimantan Selatan				
18. Kalimantan Barat				
19. Kalimantan Timur				
20. Kalimantan Tengah				
21. Kalimantan Utara				
22. Sulawesi Tengah				
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Utara				
25. Gorontalo				
26. Sulawesi Barat				
27. Sulawesi Tenggara				
28. Nusa Tenggara Barat				
29. Bali				
30. Nusa Tenggara Timur				
31. Maluku				
32. Maluku Utara				
33. Papua				
34. Papua Barat				
35. Di Luar Indonesia				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan lokasi.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Usaha Modal Ventura dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah berdasarkan lokasi.)

Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Lain dan Rencana Pengelolaan Dana Ventura yang Wajib Terlebih Dahulu Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Tabel Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Lain dan Rencana Pengelolaan Dana Ventura yang Wajib Terlebih Dahulu Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

No	Jenis Kegiatan Usaha ¹⁾	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ²⁾	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ²⁾	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha ²⁾	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha ²⁾
				Bagi Perusahaan	Bagi Debitur/Pasangan Usaha			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Keterangan:

- 1) jenis kegiatan usaha baru meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan; dan

- b. rencana pengelolaan dana ventura yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain dan rencana pengelolaan dana ventura berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha lain dan rencana pengelolaan dana ventura berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.)

2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Berbasis *Fee* dan Rencana Penggunaan Akad yang Belum Pernah Digunakan Sebelumnya yang Wajib Terlebih Dahulu Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- a. Tabel Rencana Pelaksanaan Kegiatan Berbasis *Fee* dan Rencana Penggunaan Akad yang Belum Pernah Digunakan Sebelumnya yang Wajib Terlebih Dahulu Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Jenis Kegiatan Usaha ¹⁾	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ²⁾	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha		Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ²⁾
				Bagi Perusahaan ²⁾	Bagi Pasangan Usaha/Debitur ²⁾	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Keterangan:

- 1) jenis kegiatan usaha meliputi:
- a. rencana pelaksanaan kegiatan berbasis *fee* yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan berbasis *fee* dan rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan berbasis *fee* dan rencana penggunaan akad yang belum pernah digunakan sebelumnya yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.)

Format 6 : Rencana Permodalan

1. Proyeksi Permodalan

Keterangan	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Modal Disetor Awal				
Pemegang Saham Lama				
1. ...				
2. dst				
Pemegang Saham Baru				
1. ...				
2. dst				
Total Modal Disetor				
Laba ditahan				
Total Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

2. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

(Diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal, rencana waktu, dan rencana cara serta sumber permodalan pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud.)

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan, termasuk cara yang akan dilakukan dalam perubahan permodalan yang dapat berupa setoran tunai pemegang saham, konversi saldo laba, konversi pinjaman, dan/atau dividen saham.)

Format 7 : Rencana Pendanaan

1. Rencana Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan

a. Tabel Rencana Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan bagi PMV

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Pinjaman dari pemerintah				
2. Pinjaman dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pinjaman dari perusahaan pembiayaan				
4. Pinjaman dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia				
5. Pinjaman dari bank				
6. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya				
7. Pinjaman dari lembaga keuangan multilateral				
8. Pinjaman dari badan usaha lain				
9. Pinjaman dari orang perseorangan				
10. Sekuritisasi aset				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
11. Penerbitan <i>medium term notes</i>				
12. Penerbitan obligasi				
13. Pinjaman subordinasi				
14. Wakaf				
15. Hibah				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Pinjaman dari pemerintah				
2. Pinjaman dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pinjaman dari perusahaan pembiayaan				
4. Pinjaman dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia				
5. Pinjaman dari bank				
6. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya				
7. Pinjaman dari lembaga keuangan multilateral				
8. Pinjaman dari badan usaha lain				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
9. Pinjaman dari orang perseorangan				
10. Sekuritisasi aset				
11. Penerbitan <i>medium term notes</i>				
12. Penerbitan obligasi				
13. Pinjaman subordinasi				
14. Wakaf				
15. Hibah				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				

b. Tabel Rencana Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan bagi PMVS dan UUS dari PMV

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Pendanaan dari pemerintah				
2. Pendanaan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pendanaan dari perusahaan pembiayaan				
4. Pendanaan dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia				
5. Pendanaan dari bank				
6. Pendanaan dari lembaga keuangan lainnya				
7. Pendanaan dari lembaga keuangan multilateral				
8. Pendanaan dari badan usaha lain				
9. Pendanaan dari orang perseorangan				
10. Sekuritisasi aset				
11. Penerbitan <i>medium term notes</i>				
12. Penerbitan obligasi				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
13. Pendanaan subordinasi				
14. Wakaf				
15. Hibah				
Total Penerimaan Pendanaan Baru				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				
1. Pendanaan dari pemerintah				
2. Pendanaan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah				
3. Pendanaan dari perusahaan pembiayaan				
4. Pendanaan dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia				
5. Pendanaan dari bank				
6. Pendanaan dari lembaga keuangan lainnya				
7. Pendanaan dari lembaga keuangan multilateral				
8. Pendanaan dari badan usaha lain				
9. Pendanaan dari orang perseorangan				

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
10. Sekuritisasi aset				
11. Penerbitan <i>medium term notes</i>				
12. Penerbitan obligasi				
13. Pendanaan subordinasi				
14. Wakaf				
15. Hibah				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>)				

c. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan.)

d. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan sumber pendanaan.)

2. Rencana Pendanaan Berdasarkan Mata Uang

a. Tabel Rencana Pendanaan Berdasarkan Mata Uang

Jenis Pendanaan	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Penerimaan Pendanaan Baru:				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat ¹⁾				
3. Yen Jepang ¹⁾				
4. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Penerimaan Pendanaan Baru ¹⁾				
B. Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>):				
1. Rupiah				
2. Dollar Amerika Serikat ¹⁾				
3. Yen Jepang ¹⁾				
4. Mata Uang Lainnya ¹⁾				
Total Saldo Penerimaan Pendanaan (<i>Outstanding</i>) ¹⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ dikonversikan ke dalam rupiah.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan berdasarkan mata uang.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan berdasarkan mata uang.)

Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan ¹⁾	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi ²⁾	Keterangan ³⁾
PEMBUKAAN:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang unit syariah 3. Kantor selain Kantor Cabang unit syariah				
PERUBAHAN ALAMAT:				
1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang ⁴⁾ a) Kantor Cabang b) Kantor Cabang unit syariah 3. Kantor selain Kantor Cabang unit syariah				
PENUTUPAN:				
1. Kantor Cabang 2. Kantor Cabang unit syariah 3. Kantor selain Kantor Cabang unit syariah				

Keterangan:

- 1) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta.
Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
- 4) Perubahan alamat kantor cabang hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

(Diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan.)

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi.)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

(Diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan dan/atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak Perusahaan.)

2) Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.)

3) Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.)

b. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

1) Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Materi Diklat ¹⁾	Metode Diklat ²⁾	Perkiraan Waktu Diklat ³⁾	Durasi Diklat ⁴⁾	Tempat	Narasumber /Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat

Keterangan:

- 1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dsb.
- 2) diisi dengan *in house training* atau *out house training*.
- 3) diisi dengan bulan pelaksanaan training, misal: bulan Maret 2020.
- 4) diisi dengan lamanya waktu diklat misal: 3 hari.

2) Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.)

3) Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.)

c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan ¹⁾
1.							
2.							
3.							
...							

Keterangan:

- 1) diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia.

2) Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing.)

3) Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing.)

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.)

3) Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.)

3. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

- a. Uraian Mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar, termasuk Informasi Mengenai Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

(Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Perusahaan. Selain itu perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi.)

- b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar.)

- c. Strategi

(Diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar.)

Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Asumsi	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Asumsi Makro ¹⁾ :				
1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)				
2. Nilai Tukar				
3. Tingkat Inflasi (%)				
4. Tingkat Suku Bunga Acuan				
5. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾				
Asumsi Mikro:				
1. Pertumbuhan Pembiayaan (%)				
2. Pertumbuhan Penyertaan (%)				
3. Pertumbuhan Pendanaan (%)				
4. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Pendanaan (%)				
5. Tingkat Bunga/Imbal Hasil Penyertaan/ Pembiayaan (%)				
6. Rasio Aset Penyertaan/Pembiayaan Bermasalah				
7. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ³⁾				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan asumsi per tahun dan dapat disertai dengan penjelasan mengenai sumber instansi yang menjadi dasar asumsi makro yang digunakan.

- 2) asumsi makro lainnya, seperti pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor.
- 3) asumsi mikro lainnya, seperti pangsa Perusahaan terhadap industri.

2. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan

a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Aset Tagihan Derivatif				
3. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura - Neto				
4. Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah				
5. Penyertaan pada Dana Ventura				
6. Piutang Pengelolaan Dana Ventura				
7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain				
8. Investasi Dalam Surat Berharga				
9. Aset Tetap dan Inventaris – Neto				
10. Aset Pajak Tangguhan				
11. Rupa-Rupa Aset				
Jumlah Aset				
LIABILITAS				
1. Liabilitas Segera				
2. Liabilitas Derivatif				
3. Utang Pajak				
4. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima				
5. Surat Berharga yang Diterbitkan				
6. Liabilitas Pajak Tangguhan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
7. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi				
8. Rupa-Rupa Liabilitas				
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
1. Modal				
a. Modal Disetor				
b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib				
c. Tambahan Modal Disetor				
1) Agio				
2) Biaya Emisi Efek Ekuitas				
3) Modal Hibah				
4) Tambahan Modal Disetor Lainnya				
d. Disagio				
e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali				
f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
3. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan				
4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak				
5. Komponen Ekuitas Lainnya				
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

b. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan PMVS dan UUS dari PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
ASET				
1. Kas dan Setara Kas				
2. Aset Tagihan Derivatif				
3. Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah - Neto				
4. Penyertaan pada Dana Ventura				
5. Piutang Pengelolaan Dana Ventura				
6. Tagihan terkait Kegiatan Usaha lain				
7. Investasi dalam Surat Berharga				
8. Aset Tetap dan Inventaris - Neto				
9. Aset Pajak Tangguhan				
10. Rupa-Rupa Aset				
Jumlah Aset				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
LIABILITAS				
1. Liabilitas Segera				
2. Liabilitas Derivatif				
3. Utang Pajak				
4. Pendanaan yang Diterima				
5. Surat Berharga yang Diterbitkan				
6. Liabilitas Pajak Tangguhan				
7. Pendanaan Subordinasi				
8. Rupa-Rupa Liabilitas				
Jumlah Liabilitas				
EKUITAS				
1. Modal				
a. Modal Disetor				
b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib				
c. Tambahan Modal Disetor				
1) Agio				
2) Biaya Emisi Efek Ekuitas				
3) Modal Hibah				
4) Tambahan Modal Disetor Lainnya				
d. Disagio				
e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali				
f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali				
2. Cadangan				
a. Cadangan Umum				
b. Cadangan Tujuan				
3. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
4. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak				
5. Komponen Ekuitas Lainnya				
a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan				
Jumlah Ekuitas				
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan posisi keuangan mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

3. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

a. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan Kegiatan Operasi				
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham				
2) Pendapatan dari keuntungan penjualan aset penyertaan atau surat berharga				
3) Pendapatan bunga dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi				
4) Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (<i>start-up</i>) dan/atau pengembangan usaha				
5) Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan usaha produktif				
b. Pendapatan Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham				
2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga				
3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
c. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura				
d. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
e. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain				
1) Pendapatan dari Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>				
2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
f. Pendapatan <i>Fee</i> /Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (<i>Channeling</i>)				
2. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan				
1) Pendapatan Administrasi				
2) Pendapatan Provisi				
3) Pendapatan Denda				
4) Pendapatan Operasional Lain Terkait Kegiatan Usaha PMV Lainnya				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
3. Pendapatan Operasional Lainnya				
4. Pendapatan Non Operasional				
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro				
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya				
Total Pendapatan				
BEBAN				
1. Beban Operasional				
a. Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil				
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima				
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan				
3) Beban Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah				
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>				
c. Beban Premi Asuransi				
d. Beban Tenaga Kerja				
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan				
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja				
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
e. Beban Pemasaran				
f. Beban Penyisihan/Penyusutan				
1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Penyertaan				
2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris				
g. Beban Sewa				
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan				
i. Beban Administrasi dan Umum				
j. Beban Operasional Lainnya				
2. Beban Non Operasional				
Total Beban				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				
1. Pajak Tahun Berjalan -/-				
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan				
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap				
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing				
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual				
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas				
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan				
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

- ¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada:
- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif PMVS dan UUS dari PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Operasional				
a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham				
2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan dan Surat Berharga				
3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
b. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura				
c. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
d. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain				
1) Pendapatan dari Kegiatan Pelayanan Jasa				
2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Jasa Keuangan				
e. Pendapatan Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (<i>Channeling</i>)				
2. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan				
a. Pendapatan Administrasi				
b. Pendapatan Provisi				
c. Pendapatan Operasional Lain Terkait Kegiatan Usaha PMV Lainnya				
3. Pendapatan Operasional Lainnya				
4. Pendapatan Non Operasional				
a. Pendapatan Jasa Giro				
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya				
Total Pendapatan				
BEBAN				
1. Beban Operasional				
a. Beban Imbal Hasil				
1) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima				
2) Beban Imbal Hasil dari Surat Berharga yang Diterbitkan				
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
c. Beban Premi Asuransi				
d. Beban Tenaga Kerja				
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan				
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja				
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya				
e. Beban Pemasaran				
f. Beban Penyisihan/Penyusutan				
1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
2) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris				
g. Beban Sewa				
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan				
i. Beban Administrasi dan Umum				
j. Beban Operasional Lainnya				
2. Beban Non Operasional				
Total Beban				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. Pajak Tahun Berjalan -/-				
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan				
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK				
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA				
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap				
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing				
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual				
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas				
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan				
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

- 1) tata cara perhitungan pos-pos laporan laba/rugi komprehensif mengacu pada:
- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

4. Proyeksi Laporan Arus Kas

a. Proyeksi Laporan Arus Kas PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi				
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham				
b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi				
c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif				
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>				
2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
i. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi				
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham				
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi				
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/ atau Pengembangan Usaha				
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif				
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah				
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain				
1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Operasional				
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi				
j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan				
k. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
l. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya				
B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi				
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura				
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga				
d. Arus Kas Masuk dari Dividen				
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi				
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura				
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga				
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya				
C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga				
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham				
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan				
b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)				
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen				
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya				
D. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs				
E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

b. Proyeksi Laporan Arus Kas PMVS dan UUS dari PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi				
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham				
b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain				
1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil				
2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi				
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham				
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi				
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha				
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil				
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura				
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain				
1) Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil				
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan				
g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Operasional				
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan				
j. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
k. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya				
B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi				
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura				
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga				
d. Arus Kas Masuk dari Dividen				
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Imbal Hasil Kegiatan Investasi				
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi				
a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura				
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan				
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sep X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya				
C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan				
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga				
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham				
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya				
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan				
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan				
b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)				
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen				
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya				
D. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs				
E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas				
F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				
G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan arus kas mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

5. Proyeksi Rekening Administratif

a. Proyeksi Rekening Administratif PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Belum Ditarik				
a. Dalam Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
b. Luar Negeri				
1) Bank				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank				
3) Lainnya				
Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada Debitur/Konsumen yang Belum Ditarik				
Nilai Dana Ventura yang Dikelola				
Penerbitan Surat Sanggup Bayar				
a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri				
b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri				
Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga				
a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai				
a. <i>Interest Rate Swap</i>				
b. <i>Currency Swap</i>				
c. <i>Cross Currency Swap</i>				
d. <i>Forward</i>				
e. <i>Option</i>				
f. <i>Future</i>				
g. Lainnya				
Rekening Administratif Lainnya				
a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku				
b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih				
c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih				
d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan				
Jumlah				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

b. Proyeksi Rekening Administratif PMVS dan UUS dari PMV

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik				
a. Dalam Negeri				
1) Bank Syariah				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah				
3) Lainnya				
b. Luar Negeri				
1) Bank Syariah				
2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah				
3) Lainnya				
Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada Pasangan Usaha yang Belum Ditarik				
Nilai Dana Ventura yang dikelola				
Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah				
a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri				
b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri				
Penyaluran Pembiayaan dengan skema Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)				
Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah				
a. <i>Spot</i>				
b. <i>Forward Agreement</i>				

Pos-Pos ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
Rekening Administratif Lainnya				
a. Aset Investasi Hapus Buku				
b. Aset Investasi Hapus Buku yang Berhasil Ditagih				
c. Aset Investasi Hapus Tagih				
d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan				
Jumlah				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan pos-pos laporan rekening administratif mengacu pada:

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

Format 11 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu

Rasio dan Pos Tertentu ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi		
		Des X-1	Juni X	Des X
1. <i>Gearing Ratio</i> (kali)				
2. Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang (<i>Outstanding Principal</i>) Neto terhadap Total Aset (<i>Investment and Financing to Asset Ratio</i>) (%)				
3. Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)				
4. Modal Sendiri/Modal Disetor (%)				
5. NPIF <i>Gross</i> (%)				
6. NPIF <i>Netto</i> (%)				
7. ROE (%)				
8. ROA (%)				
9. BOPO (%)				
10. <i>Current Ratio</i> (%)				
11. <i>Cash Ratio</i> (%)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV.

Format 12 : Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan yang menggabungkan diri:

1)

2)

3)

Perusahaan yang menerima penggabungan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi penggabungan.)

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan:

Perusahaan yang meleburkan diri:

1)

2)

3) dan seterusnya.

Perusahaan setelah peleburan:

b. Alasan, Pertimbangan, dan Tujuan

(Diisi dengan alasan, pertimbangan, dan tujuan peleburan.)

c. Strategi dan Langkah-Langkah Pelaksanaan

(Diisi dengan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan peleburan.)

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:

Perusahaan yang memisahkan diri:

Perusahaan hasil pemisahan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) dan seterusnya.

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi pemisahan.)

Format 13 : Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan

1. Penjelasan

(Diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan.)

2. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan.)

3. Strategi

(Diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan.)

Format 14 : Rencana Konversi PMV Menjadi PMVS

1. Keterangan mengenai rencana konversi:
PMVS hasil konversi:

2. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan/pertimbangan konversi.)

3. Strategi

(Diisi dengan strategi konversi menjadi PMVS.)

Format 15 : Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS

1. Rencana Pembentukan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:

UUS hasil pembentukan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan dan pertimbangan pembentukan UUS.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi pembentukan UUS.)

2. Rencana Penutupan UUS

a. Keterangan mengenai rencana penutupan:

UUS yang ditutup:

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan dan pertimbangan penutupan UUS.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi penutupan UUS.)

3. Rencana Pemisahan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:

UUS yang memisahkan diri:

PMVS hasil pemisahan:

b. Alasan dan Pertimbangan

(Diisi dengan alasan dan pertimbangan pemisahan UUS.)

c. Strategi

(Diisi dengan strategi pemisahan UUS.)

Format 16 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
- 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 4;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;
 - 3) realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam format 7;
 - 4) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan
 - 5) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Diisi dengan upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio keuangan dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio keuangan dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
- 1) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam format 6;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam format 8;
 - 3) realisasi atas rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam format 12;
 - 4) realisasi atas rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam format 13;
 - 5) realisasi atas rencana konversi PMV menjadi PMVS sebagaimana dimaksud dalam format 14; dan
 - 6) realisasi atas rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam format 15.

Diketahui oleh:

Direksi:

(ttt dan nama terang)

Direksi:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Format 17 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

(Diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan.)

Disetujui oleh:	
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
Dewan Komisaris:	(ttd dan nama terang)
dst...	dst...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja